

Analisis Kasus Kesenjangan Pendidikan Dalam Perspektif Sila Ke-5 Pancasila: Studi Kasus SMA Antara Wilayah Kota Maju dan Daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal)

Grace Simarmata¹ Friska Sitorus² Khairunnisa³ Indah Khalisa⁴ Rahel Nanda Jaenetta Silalahi⁵ Nazla Suhaila Parinduri⁶ Sri Yunita⁷

Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: simarmatagracebunga@gmail.com¹ friskasitorustbjs@gmail.com²
khairunnisa21021@gmail.com³ indahkhalisa00@gmail.com⁴ netasilalahi933@gmail.com⁵
nzlsuhaila@gmail.com⁶ sr.yunita@unimed.ac.id⁷

Abstrak

Kesenjangan sosial dalam pendidikan antara wilayah perkotaan dan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) merupakan permasalahan yang masih menjadi penghambat utama penyelesaian proyek-proyek pembangunan nasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap stagnasi pendidikan, dampaknya terhadap sumber daya manusia, dan strategi potensial untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi publik dengan menyajikan berbagai literatur akademis, laporan pemerintah, dan temuan penelitian yang berkaitan langsung dengan topik pendidikan di wilayah perkotaan dan 3T. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kekurangan infrastruktur, kinerja siswa yang buruk, kualitas fasilitas belajar yang buruk, dan kondisi sosial ekonomi secara umum merupakan penyebab utama stagnasi pendidikan. Peserta didik di wilayah perkotaan menikmati akses yang lebih baik terhadap teknologi, fasilitas, dan layanan pendidikan, sementara di wilayah 3T, sering kali terdapat permasalahan seperti keterbatasan sarana, sekolah yang jauh, dan kondisi ekonomi keluarga secara keseluruhan. Kondisi ini berimplikasi pada kualitas pendidikan, angka putus sekolah, dan kondisi umum generasi muda dari 3T. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan, pemerataan pendidik, dan pemanfaatan teknologi digital sebagai pengganti solusi tradisional. Studi ini menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat umum dalam memastikan pendidikan yang inklusif dan berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Kesenjangan Sosial, Pendidikan, Perkotaan, Daerah 3T, Studi Pustaka

Abstract

The social gap in education between urban areas and 3T (Frontier, Outermost, and Disadvantaged) regions remains a major obstacle to the completion of national development projects. The purpose of this study is to analyze the factors contributing to educational stagnation, its impact on human resources, and potential strategies to reduce this gap. The research methodology used is a public study presenting various academic literature, government reports, and research findings directly related to the topic of education in urban and 3T areas. The research findings show that infrastructure deficiencies, poor student performance, poor quality of learning facilities, and general socioeconomic conditions are the main causes of educational stagnation. Students in urban areas enjoy better access to technology, facilities, and educational services, while in 3T areas, there are often problems such as limited resources, distant schools, and overall family economic conditions. These conditions have implications for the quality of education, dropout rates, and the general condition of the younger generation in 3T areas. Therefore, firmness, equal distribution of educators, and the use of digital technology as a substitute for traditional solutions are needed. This study highlights the importance of cooperation between the government and the general public in ensuring inclusive education. This condition has implications for the quality of education, dropout rates, and the general condition of the younger generation in 3T areas. Therefore, firmness, equal distribution of educators, and the use of digital technology as a substitute for traditional solutions are needed. This study highlights the importance of cooperation between the government and the general public in ensuring inclusive and well-run education.

Keywords: Social Inequality, Education, Urban Areas, 3T Regions, Literature Study



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kita ketahui dan rasakan bersama bahwa kondisi pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih belum memberikan hasil yang memuaskan, terlebih jika dihubungkan dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003 bab 11 pasal 3 yang menyatakan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab". Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa, praktek. pendidikan di Indonesia diarahkan kepada upaya mengembangkan manusia utuh, manusia yang bukan hanya cerdas dari aspek kecakapan intelektual saja, melainkan juga kepribadian dan keterampilannya, atau dalam istilah penulis insan yang cerdas otaknya, lembut hatinya dan terampil tangannya.

Pendidikan bermutu dalam pembangunan sebuah bangsa (termasuk dalamnya pembangunan pada lingkup kabupaten/kota) adalah suatu keniscayaan, melalui pendidikan bermutu dapat dilahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu row input proses pembangunan. Tanpa pendidikan yang bermutu tidak mungkin tujuan pembangunan sebuah bangsa dapat terwujud dengan baik. Pendidikan bermutu dan pembangunan berkualitas bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Anas at all., t.t). Pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk kemampuan dan kualitas hidup, harkat, martabat, dan kepribadian bangsa. Pendidikan nasional merupakan suatu upaya yang sistematis guna mewujudkan kondisi belajar dan kegiatan pembelajaran agar peserta didik aktif dalam mengembangkan kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlakul karimah, dan softskill yang diperlukan untuk diri mereka sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia agar mencapai tujuan nasional yang nantinya diharapkan (Luthfia at all., 2023).

Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, yang menjadi kunci bagi kemajuan suatu bangsa. Sebagai salah satu negara. dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, berdasarkan data dari Worldometers, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 mencapai 269 juta jiwa. Dengan. populasi sebesar itu, kualitas SDM di Indonesia memiliki peranan strategis dalam meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun global. Namun, data menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar (Vega at all., 2024). Pendidikan merupakan sektor vital sekaligus pembangun peradaban bangsa yang dalam praktiknya perlu dioptimalkan pelaksanaan dan peningkatan mutu kualitasnya. Dalam konstitusi negara telah disebutkan. bahwa, setiap masyarakat Indonesia pendidikan menjadi langkah awal untuk mempersiapkan mutu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang dapat bersaing secara global. Pemerataan pendidikan sudah seharusnya menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional. Pemerataan pendidikan dan segala aspek pendukungnya menjadi hal yang perlu dioptimalkan pemerintah.

Indonesia sebagai negara kepulauan membuat pemerataan pendidikan dalam praktiknya belum sepenuhnya dapat dioptimalkan. Daerah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal) menjadi daerah di Indonesia yang masih berada dalam kualitas pendidikan rendah. Hal ini tidak terlepas dari berbagai problematika daerah 3T, seperti minimnya tenaga pendidik, pembangunan sarana pendidikan yang pasil sulitnya aksesibilitas pada sarana prasarana pendidikan, kondisi sosial masyarakat yang masih terbelakang, hingga mobilitas sosial yang belum mendukung

masyarakat. Urgensi pengoptimalan pendidikan pada daerah 3T tentu menjadi hal yang perlu diupayakan pemerintah mengingat hingga tahun. 2020 masih terdapat 62 kabupaten di Indonesia yang tergolong dalam daerah 3T (Tutukansa dan Tuffahati. 2022). Kondisi ini bertentangan dengan UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan menjalani pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan analisis guna memahami faktor-faktor penyebab kesenjangan sosial di berbagai wilayah Indonesia, serta langkah-langkah yang harus dilakukan agar permasalahan ini bisa teratasi. Jika kesenjangan pendidikan dapat diselesaikan, pendidikan di Indonesia akan mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul (Victorynie at all., 2024).

Kurang meratanya penyaluran pendidik membuat daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) mengalami perbedaan mutu pendidik dengan daerah lain. Jika dibandingkan memang sangat jelas sekali perbedaan yang akan terlihat dari keduanya, pendidikan di kabupaten atau kota yang sudah sangat maju dan berbasis komputer dengan fasilitas ruang dan sarana belajar yang mendukung. Sedangkan di daerah perbatasan atau daerah 3T yang terjadi adalah bangunan sekolah saja tidak memadai, sarana yang diberikan tidak sama dengan sekolah yang berada di kota contohnya saja komputer LCD proyektor, dikarenakan berbagai faktor, salah satunya faktor geografis. Dikatakan bahwa sinyal untuk telepon saja sulit untuk didapatkan bagaimana untuk akses internet. Masyarakat perkampungan yang selalu dianggap memiliki sikap kolot dan tradisional seolah melekat dengan jati diri mereka, dan berbanding terbalik dengan masyarakat kota yang modern dan selalu menerima perubahan dan perkembangan teknologi. Hal ini menjadi penghambat untuk memajukan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, mereka sangat tabu dan malas untuk mengikuti perkembangan jaman dan teknologi sekarang ini. Padahal program dan bantuan dari pemerintah untuk masyarakat di daerah terpencil bertujuan supaya masyarakat dapat berkembang dan hidup dengan baik (Rulinting, 2018). Perlu adanya pencarian solusi yang baik dan relevan untuk mengatasi hal tersebut, supaya masyarakat di Indonesia, khususnya yang bermukim di daerah 3T bisa merasakan pendidikan sebagaimana layaknya yang ada di daerah perkotaan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji berbagai solusi potensial dalam mengatasi krisis pendidikan di daerah 3T melalui pendekatan inovatif, teknologi, serta kolaborasi multi-pihak (Dalimunthe at all., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan observasi langsung. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Sumber literatur dipilih berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas, dan kemutakhiran sehingga dapat memberikan dasar teoritis yang kuat. Sementara itu, observasi langsung dilakukan di lapangan dengan mengamati objek penelitian secara sistematis melalui pencatatan, dokumentasi, dan pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti. Observasi ini mencakup perbandingan antara dua sekolah dengan kondisi fasilitas yang berbeda. Sekolah utama memiliki fasilitas yang memadai seperti laboratorium kimia dan biologi yang lengkap dengan mikroskop, serta laboratorium komputer yang dilengkapi dengan AC dan perangkat komputer yang memadai. Setiap ruang kelas dilengkapi meja dan kursi yang layak serta pendingin ruangan (AC). Ruang guru difasilitasi dengan Wi-Fi, kamar mandi, dan AC. Selain itu, sekolah utama juga memiliki lapangan yang luas dan kantin yang sangat layak. Sebaliknya, sekolah pembanding hanya memiliki ruang kelas yang disekat menggunakan bambu dengan meja dan kursi seadanya. Koneksi internet dan listrik seringkali tidak stabil, akses jalan menuju sekolah sulit dijangkau dan jauh dari kata layak. Fasilitas pendukung seperti kantin, lapangan, laboratorium, maupun komputer tidak tersedia, hanya terdapat warung kecil

sederhana sebagai pengganti kantin. Data yang diperoleh dari literatur dan observasi kemudian dianalisis secara kualitatif dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan temuan lapangan dengan teori yang ada dalam literatur untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta keterkaitan antara keduanya. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan cara memverifikasi hasil observasi terhadap literatur sehingga hasil penelitian lebih objektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

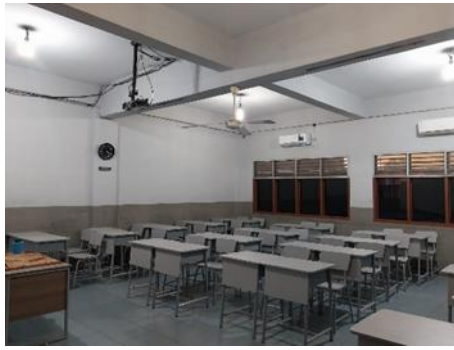
Kesenjangan sosial yang terjadi di SMA Dharmawangsa Medan tampak cukup jelas dalam keseharian siswa. Perbedaan latar belakang ekonomi menjadi salah satu penyebab utama. Sebagian siswa datang dari keluarga menengah ke atas dengan fasilitas pribadi yang lengkap, seperti gadget terbaru, kendaraan pribadi, hingga uang saku yang relatif besar. Sementara itu, ada pula siswa yang berasal dari keluarga sederhana, yang hanya mampu membawa perlengkapan belajar seadanya. Kondisi ini kadang menimbulkan jarak dalam pergaulan, di mana muncul kelompok-kelompok kecil berdasarkan status ekonomi. Selain perbedaan ekonomi, kesenjangan juga terlihat pada prestasi akademik. Siswa yang memiliki akses ke bimbingan belajar di luar sekolah umumnya menunjukkan hasil yang lebih baik. Sedangkan siswa yang hanya mengandalkan pembelajaran formal di sekolah cenderung tertinggal. Ketidakmerataan ini semakin nyata ketika mengikuti ujian atau lomba akademik. Partisipasi dalam kegiatan sekolah pun tidak lepas dari pengaruh ekonomi. Ekstrakurikuler dan perlombaan biasanya lebih sering diikuti siswa dari keluarga mampu, karena mereka memiliki dukungan dana dan fasilitas yang memadai. Di sisi lain, siswa yang kurang mampu jarang ikut karena terkendala biaya, meski sebenarnya memiliki potensi. Fenomena gaya hidup modern juga memperkuat kesenjangan, terutama dengan maraknya budaya pamer barang bermerek dan tren media sosial. Hal ini menciptakan pertemanan eksklusif yang hanya terbuka bagi kelompok tertentu.



Gambar 1. Laboratorium Bahasa



Gambar 2. Kantin Sekolah



Gambar 3. Ruang Kelas



Gambar 4. Perpustakaan



Gambar 5. Laboratorium Kimia & Biologi

Berbeda dengan kondisi di sekolah perkotaan, ketimpangan pendidikan di Maluku lebih bersifat struktural. Akses pendidikan di kota besar seperti Ambon relatif lebih baik, dengan sekolah yang memiliki sarana memadai dan tenaga pendidik lebih banyak. Namun, di pulau-pulau terpencil, masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas dasar. Ada sekolah yang bangunannya sederhana, kekurangan buku, bahkan sulit dijangkau karena transportasi yang terbatas. Keterbatasan tenaga pendidik juga menjadi masalah serius. Di beberapa sekolah, hanya ada satu atau dua guru tetap, sehingga satu orang guru terpaksa mengajar mata pelajaran di luar bidang keahliannya. Kekurangan sarana prasarana, mulai dari laboratorium, perpustakaan, hingga akses internet, semakin memperburuk kualitas pendidikan. Tidak sedikit anak di wilayah pesisir atau kepulauan memilih putus sekolah karena faktor ekonomi dan jarak sekolah yang jauh. Kondisi ini mengakibatkan kualitas pendidikan di Maluku tidak merata, di mana sekolah di pusat kota jauh lebih maju dibanding sekolah di daerah terpencil.



Gambar 6. Bangunan Sekolah



Gambar 7. Ruangan Kelas



Gambar 8. Lapangan Sekolah

Jika ditelusuri lebih jauh, ada beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya kesenjangan sosial dan ketimpangan pendidikan ini. Pertama adalah faktor ekonomi keluarga, yang sangat menentukan kelanjutan pendidikan anak. Kedua, faktor geografis, terutama di Maluku yang berbentuk kepulauan sehingga distribusi sarana pendidikan menjadi terhambat. Faktor kebijakan pemerintah juga memiliki peran besar. Program pemerataan pendidikan sebenarnya ada, namun implementasinya di daerah 3T masih belum maksimal. Faktor sosial budaya turut memengaruhi, misalnya adanya anggapan bahwa sekolah bukanlah prioritas, terutama di keluarga yang mengutamakan pekerjaan untuk membantu ekonomi. Terakhir, perkembangan teknologi juga menjadi faktor yang memperlebar kesenjangan. Siswa yang memiliki akses internet bisa belajar mandiri, sementara yang tidak punya akses tertinggal semakin jauh. Perubahan dari tahun ke tahun memang terjadi, baik di sekolah perkotaan maupun di Maluku. Di SMA Dharmawangsa Medan, kesenjangan gaya hidup semakin tampak akibat pengaruh media sosial. Namun, ada juga perkembangan positif seperti adanya program beasiswa yang membantu siswa kurang mampu agar tetap bisa bersekolah. Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pun meningkat, meski masih didominasi oleh kalangan menengah ke atas. Di Maluku, jumlah sekolah bertambah setiap tahun, meskipun belum merata. Program digitalisasi mulai diperkenalkan, walaupun baru menjangkau sebagian wilayah. Jumlah guru

kontrak meningkat, namun kualitasnya masih bervariasi. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan perlahan membaik, meski angka putus sekolah masih cukup tinggi di daerah terpencil.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi dapat diterapkan. Di sekolah perkotaan seperti SMA Dharmawangsa Medan, pihak sekolah dapat memperluas program beasiswa internal, memberikan subsidi atau fasilitas gratis pada kegiatan ekstrakurikuler, serta menanamkan budaya inklusif agar siswa tidak membedakan teman berdasarkan status ekonomi. Sementara itu, di Maluku, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur pendidikan dengan menyediakan transportasi antar pulau dan akses internet yang lebih luas. Jumlah tenaga pendidik juga harus ditambah, salah satunya dengan sistem rotasi guru ke daerah terpencil. Sekolah berbasis komunitas atau asrama dapat menjadi solusi agar anak-anak di pulau kecil tetap bisa mengenyam pendidikan. Selain itu, program bantuan pendidikan seperti KIP dan BOS perlu lebih dioptimalkan agar tepat sasaran. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan sosial di sekolah perkotaan lebih banyak dipengaruhi faktor ekonomi, gaya hidup, dan akses terhadap fasilitas tambahan, sedangkan ketimpangan pendidikan di Maluku lebih kompleks karena menyangkut masalah geografis, keterbatasan sarana prasarana, dan pemerataan tenaga pendidik. Walaupun sudah ada perkembangan setiap tahun, perubahan tersebut berjalan lambat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah agar pemerataan pendidikan dapat benar-benar terwujud.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari artikel ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan antara sekolah di wilayah kota maju dan daerah 3T masih menjadi persoalan serius yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Perbedaan fasilitas, kualitas tenaga pendidik, serta akses terhadap teknologi dan informasi membuat peserta didik di daerah 3T sulit bersaing secara setara dengan peserta didik di kota maju. Kondisi ini menegaskan bahwa cita-cita keadilan sosial yang terkandung dalam sila ke-5 Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, belum sepenuhnya terwujud dalam bidang pendidikan. Gap penelitian yang diangkat dalam studi ini adalah minimnya penelitian yang secara khusus menghubungkan persoalan kesenjangan pendidikan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-5. Kebanyakan penelitian terdahulu hanya menyoroti aspek kebijakan, sosial-ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur pendidikan, tanpa mengaitkannya dengan dimensi filosofis dan ideologis bangsa. Novelty dari penelitian ini adalah penggunaan pendekatan analisis berbasis sila ke-5 Pancasila yang dipadukan dengan studi kasus nyata perbandingan SMA di kota maju dan daerah 3T, sehingga menghasilkan perspektif baru. Pendekatan ini menegaskan bahwa kesenjangan pendidikan tidak hanya dilihat sebagai masalah teknis atau administratif, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan ideologis negara untuk mewujudkan prinsip keadilan sosial secara nyata dalam dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, A. Y., Riana, A. W., & Apsari, N. C. (2015). Desa dan kota dalam potret pendidikan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 418-422.
- Dalimunthe, S. M., Rambe, M. H., & Dwinta, N. (2025). Solusi Krisis Pendidikan Di Daerah 3T: Pendekatan Dan Inovasi Untuk Kemajuan. *El Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 8(1), 1-20.
- Luthfia, A. N., Wahiddiyah, N. P., Safitri, D., & Sujarwo, S. (2023). Analisis Problematika Pendidikan Indonesia Di Wilayah 3T. *Guruku: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1 (4), 36-46.

- May, B., Tobing, D. U. A. L., Ritonga, N. S., Jamaludin, J., & Yunita, S. (2024). Strategi Pembelajaran Kreativitas Media Bamboozle Untuk Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa. *Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(1), 62-69.
- Muallimah, S., Andini, L. A., Sanadi, Y. K. C., Siregar, E. P., & Yunita, S. (2024). Mengembangkan kurikulum yang lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. *Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(2), 982-989.
- Tutukansa, A. F., & Tuffahati, E. D. (2022). Optimalisasi Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan Provinsi Papua Sebagai Daerah 3T Di Indonesia. *Jurnal Khazanah*, Volume, 14(2).
- Vega, A., Maharani, I. V. A., Putri, J. A., Hartono, M. R. A. M., & Navridya, R. U. (2024). Kesetaraan Akses Pendidikan: Analisis Pengimplementasian Nilai Pancasila Dalam Pemerataan Akses Pendidikan Di Indonesia. *Lentera Ilmu*, 1(2), 44-57.
- Victorynie, I., Mursiyah, U., & Apipah, S. A. Z. (2024). Tantangan Pengembangan SDM Pendidikan dalam Menghadapi Kesenjangan Sosial dan Peningkatan Efektivitas Pembelajaran. *Attractive: Innovative Education Journal*, 6(3), 514-522.
- Yunita, S., Lumbantoruan, L., Kaban, H. B., Pandiangan, P. P., Ester, E., Ndaha, G. Y., & Sihotang, J. R. O. (2024). Effectiveness of Environmental Law in Indonesia: Study on the Implementation of Law Enforcement in Cases of Environmental Damage. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(2), 1882-1887.